

Pemberdayaan Pelaku UMKM melalui Sosialisasi KDMP dan Pendampingan Pendaftaran QRIS di Desa Karangjati

Ayla Alifia^{*1}, Agata Sonia Adi Setyabudi², Arif Nur Sodik³, Cantika Chelsearly Azahra Ramadhani⁴, Dimas Alfarizi⁵, Galati Jagad Satrio⁶, Job Esli Brightly Purba⁷, Riska Siwi Jayanti⁸, Sena Andika Prastia⁹, Zelly Agustina¹⁰, Muhammad Bagus Sistriatmaja¹¹

¹Prodi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{2,3,4,11}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{5,6}Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

⁷Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{8,9,10}Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*e-mail: ayla_alifia11@student.uns.ac.id¹, soniaagata@student.uns.ac.id², arifnursodik244@student.uns.ac.id³, cantikachlsss@student.uns.ac.id⁴, dimasalfarizi@student.uns.ac.id⁵, galatijagadsatrio16@student.uns.ac.id⁶, jobee.28@student.uns.ac.id⁷, riskasiwijayanti332@student.uns.ac.id⁸, senaandikaprastia725@student.uns.ac.id⁹, zellyagustina@student.uns.ac.id¹⁰, bagussistriatmaja@staff.uns.ac.id¹¹

Abstrak

Desa Karangjati memiliki potensi ekonomi pada sektor UMKM, namun pengembangannya terhambat oleh sistem transaksi konvensional dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan memperluas pasar di era ekonomi digital. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pendampingan pendaftaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan: survei dan koordinasi, sosialisasi serta pendampingan langsung, dan tindak lanjut berupa pendistribusian standee QRIS secara door-to-door. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM hadir dalam sosialisasi, dan 12 UMKM di antaranya berhasil didampingi hingga pembuatan akun QRIS aktif serta menerima standee. Melalui program ini, pemahaman masyarakat mengenai fungsi kolektif koperasi semakin membaik, dan pelaku UMKM mulai memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan sistem pembayaran digital. Penggunaan QRIS ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi UMKM di Desa Karangjati untuk beradaptasi dengan pencatatan yang lebih rapi dan memperluas inklusi keuangan di pedesaan.

Kata kunci: Karangjati, Koperasi Desa, Pembayaran Digital, QRIS, UMKM

Abstract

Karangjati Village has economic potential in the UMKM sector, however, its development is hindered by conventional transaction systems and low digital literacy among the community. This causes business actors to struggle with market expansion in the digital economy era. This community service activity aims to optimize UMKM empowerment through the socialization of the role of Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) and mentoring for Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) registration. The implementation method consists of three stages: survey and coordination, socialization with direct assistance, and follow-up in the form of door-to-door distribution of QRIS standees. The results showed that 25 UMKM actors attended the socialization, and 12 of them were successfully assisted until their active QRIS accounts were created and received standees. Through this program, the community's understanding of the collective function of cooperatives improved, and UMKM actors began to possess basic skills to operate digital payment systems. The use of QRIS is expected to be an initial step for UMKM in Karangjati Village to adapt to better financial recording and expand financial inclusion in rural areas.

Keywords: Karangjati, Village Cooperative, Digital Payment, QRIS, UMKM

1. PENDAHULUAN

Desa Karangjati merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan berkembang dari sektor agraris serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ekonomi masyarakat setempat sebagian besar ditopang oleh unit usaha skala rumah tangga yang memproduksi dan memasarkan kebutuhan pangan harian. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dalam menopang kesejahteraan warga, pengembangan UMKM di desa ini masih berhadapan dengan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah sebagian besar pelaku usaha masih sangat bergantung pada sistem pengelolaan usaha dan transaksi keuangan secara konvensional, sehingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung operasional bisnis mereka belum berjalan secara optimal.

Secara formal, keberadaan dan kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Usaha Mikro mendefinisikan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar. Sementara itu, Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang berada pada skala di atas usaha kecil namun belum tergolong usaha besar. Kwartono (2009) menegaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- serta dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, terdapat kurang lebih 30 unit UMKM yang ada di Desa Karangjati. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku usaha tersebut belum memanfaatkan fasilitas pembayaran digital. Keterbatasan pemahaman operasional mengenai aplikasi keuangan, kendala stabilitas jaringan internet di kawasan pedesaan, serta belum adanya program pendampingan teknis yang intensif membuat para pelaku UMKM enggan beralih dari transaksi tunai tradisional. Padahal, pada era modern saat ini, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah merubah tatanan ekonomi global secara mendasar, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Inovasi sistem pembayaran digital telah menjadi komponen vital bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena menawarkan keunggulan dalam hal kemudahan, kecepatan, kepraktisan, serta efisiensi transaksi.

Sebagai langkah konkret percepatan digitalisasi keuangan nasional, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS merupakan sebuah inovasi standar kode QR nasional yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di Indonesia, sehingga proses transaksi antarpenyedia jasa layanan keuangan menjadi lebih efisien, praktis, dan terjamin keamanannya (Ismail dkk., 2025). Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan transaksi keuangan secara instan hanya dengan memindai kode QR menggunakan berbagai dompet elektronik maupun aplikasi perbankan. Penerapan pembayaran berbasis QRIS tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pembeli, tetapi juga membantu pemilik usaha dalam menciptakan pencatatan arus kas yang lebih rapi, teratur, dan transparan.

Meskipun teknologi pembayaran digital seperti QRIS telah berkembang pesat dan memberikan banyak kemudahan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang cukup lebar pada masyarakat pedesaan seperti Desa Karangjati. Ketergantungan yang tinggi pada penggunaan uang tunai dipengaruhi oleh minimnya literasi keuangan digital, rendahnya aksesibilitas terhadap informasi modern, serta kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat. Adopsi teknologi keuangan menghadapi tantangan psikologis dan teknis, mulai dari kekhawatiran akan keamanan transaksi hingga kerumitan prosedur pendaftaran. Kondisi ini menegaskan bahwa penyediaan teknologi saja tidak cukup; diperlukan

pendekatan terintegrasi dan edukatif agar masyarakat desa dapat beradaptasi secara bertahap dan tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi digital.

Dalam upaya menjembatani kesenjangan akses keuangan digital di pedesaan, kelembagaan ekonomi lokal memegang peranan yang sangat strategis. Sejak awal masa kemerdekaan, koperasi telah diperkenalkan di Indonesia sebagai pilar utama dan landasan pembangunan ekonomi nasional yang selaras dengan amanat konstitusi. Berakar dari cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, koperasi tumbuh sebagai wadah pelestarian nilai budaya berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong (Sutrisno, 2003; Indaryan, 2024). Melalui pembinaan pada sektor usaha skala kecil, koperasi memfasilitasi kolaborasi antaranggota untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat kemandirian finansial bersama. Penguatan nilai-nilai kolektif inilah yang menegaskan kedudukan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas.

Dalam ekosistem ekonomi pedesaan secara khusus, koperasi desa memegang peran sentral sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kolektif masyarakat. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi strategis, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, layanan simpan pinjam, hingga distribusi kebutuhan pokok dan pemasaran produk lokal (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018). Melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif, koperasi mampu membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada pihak luar seperti tengkulak, sekaligus memperluas akses permodalan usaha (Hendar, 2010). Secara lebih spesifik, inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mengedepankan prinsip kebersamaan demi memperluas kesempatan usaha warga (Saputri dkk., 2025). Kendati memiliki potensi besar sebagai pusat inklusi keuangan, keberlanjutan KDMP sangat bergantung pada kapasitas manajemen pengurus, pembagian peran yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan BUMDes, serta kemandirian usaha agar tidak sekadar bergantung pada dana bantuan pemerintah.

Koperasi dapat berfungsi sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang sangat efektif dalam mendampingi proses digitalisasi ekonomi desa mengingat kedekatan geografis dan sosialnya dengan warga. Sinergi antara kelembagaan KDMP dan adopsi sistem pembayaran QRIS membentuk satu rangkaian pemberdayaan yang saling melengkapi: koperasi bertindak menguatkan tatanan sosial, kelembagaan, dan permodalan, sedangkan QRIS memodernisasi infrastruktur pelayanannya secara digital (Putri dkk., 2025). Sayangnya, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di Desa Karangjati mengenai fungsi strategis penguatan kelembagaan ini juga masih tergolong rendah.

Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis situasi tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dirancang untuk berfokus pada peningkatan literasi digital dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di Desa Karangjati melalui sosialisasi peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pendampingan teknis secara langsung dalam pendaftaran akun QRIS. Melalui pendekatan yang edukatif, aplikatif, dan berkelanjutan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Karangjati tidak hanya mampu beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital dan mempermudah transaksi usahanya, tetapi juga turut serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di tingkat desa secara inklusif.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan kombinasi metode pendidikan masyarakat (*community education*) dan pendampingan teknis (*technical assistance*) yang ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangjati. Penentuan mitra sasaran dilakukan berdasarkan kriteria spesifik, yaitu pelaku UMKM yang masih menjalankan sistem transaksi konvensional (belum terintegrasi dengan pembayaran digital) serta telah memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat ponsel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Balai

Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Mekanisme dan alur pelaksanaan program dirancang secara terstruktur ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini diawali dengan kegiatan observasi dan survei lapangan guna mengidentifikasi kondisi riil usaha, pemetaan jumlah UMKM aktif, serta analisis kebutuhan teknis para pelaku usaha di desa sasaran. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan koordinasi strategis bersama pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan perangkat Desa Karangjati untuk menyelaraskan materi edukasi, menentukan indikator keberhasilan, dan menyusun jadwal kegiatan. Tahap persiapan diakhiri dengan pendataan definitif calon mitra sasaran serta pendistribusian surat undangan kegiatan secara langsung kepada para pelaku UMKM.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti yang dikemas dalam bentuk forum sosialisasi dan edukasi interaktif di Balai Desa Karangjati. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM dan tokoh masyarakat setempat. Pemaparan materi memuat dua fokus utama, yakni penguatan peran strategis kelembagaan KDMP dalam memfasilitasi ekonomi kolektif warga serta urgensi adaptasi teknologi transaksi digital di era ekonomi modern. Penyampaian materi menerapkan metode komunikasi dua arah (*two-way communication*) untuk merangsang diskusi kritis dan partisipasi aktif warga. Setelah sesi pencerahan dan tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis secara langsung (*on the spot*). Pada sesi ini, tim mendampingi dan memfasilitasi proses pendaftaran akun *merchant* QRIS bagi para pelaku UMKM yang bersedia beralih ke sistem pembayaran digital, mulai dari pengisian data usaha hingga pengunduhan aplikasi penunjang.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilaksanakan secara komprehensif untuk mengukur efektivitas program terhadap pemahaman dan keterampilan praktis peserta.

Evaluasi keberhasilan kegiatan diukur melalui pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi riil mitra UMKM sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator evaluasi berfokus pada lima parameter utama, yaitu: (1) perubahan sistem pembayaran usaha, (2) pemahaman fungsi KDMP dan transaksi digital, (3) kepemilikan akun *merchant* QRIS aktif, (4) kemandirian operasional aplikasi, serta (5) ketersediaan media display pembayaran non-tunai di tempat usaha.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan dukungan fasilitas operasional, tim melakukan perekapan data akun aktif dan mencetak kode QRIS ke dalam bentuk *standee* akrilik fisik. *Standee* tersebut kemudian didistribusikan secara *door-to-door* ke lokasi usaha masing-masing warga. Kunjungan langsung ini sekaligus difungsikan sebagai sarana pemantauan (*monitoring*) untuk memastikan infrastruktur transaksi digital tersebut terpasang dengan baik dan siap dioperasikan dalam kegiatan jual-beli harian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Kelembagaan

Forum sosialisasi dan edukasi kelembagaan dilaksanakan sebagai tahapan awal untuk membangun kesadaran (*awareness*) masyarakat Desa Karangjati terhadap pentingnya digitalisasi ekonomi. Kegiatan ini mempertemukan para pelaku UMKM, warga masyarakat, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta perangkat Desa Karangjati. Berdasarkan lembar presensi kehadiran, kegiatan forum ini diikuti oleh 25 pelaku UMKM dan tokoh masyarakat setempat. Pemaparan materi difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengenalan

visi, misi, dan peran strategis KDMP sebagai wadah penggerak ekonomi kolektif desa, serta urgensi adopsi transaksi non-tunai melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).



Gambar 1. Sosialisasi Pengenalan KDMP dan Pelatihan Pendaftaran Qris Bersama Warga

Terlihat para pelaku UMKM dan warga Desa Karangjati saat menyimak pemaparan materi. Suasana forum dirancang secara kondusif dan interaktif, di mana narasumber memberikan penjelasan menggunakan media presentasi visual. Penyampaian materi menerapkan metode komunikasi dua arah (*two-way communication*) yang interaktif. Warga tidak hanya bertindak sebagai pendengar pasif, tetapi juga diajak secara aktif berdiskusi mengenai kendala operasional dan manajemen keuangan yang mereka hadapi sehari-hari. Berdasarkan hasil evaluasi melalui sesi diskusi dan tanya-jawab langsung, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Diskusi berkembang secara dinamis ketika membahas bagaimana teknologi finansial mampu membuka peluang baru bagi pelaku usaha pedesaan yang sebelumnya belum terjangkau secara optimal oleh sistem perbankan konvensional (*unbanked society*).

Edukasi ini berhasil membuka wawasan masyarakat bahwa adopsi layanan pembayaran digital bukan sekadar mengikuti tren modernisasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan kesenjangan digital (*digital divide*) yang selama ini menghambat potensi pengembangan UMKM di wilayah pedesaan. Warga mulai menyadari secara kolektif bahwa KDMP dapat hadir sebagai lembaga pendamping lokal yang terpercaya, sementara infrastruktur QRIS menjadi alat pembayaran efektif untuk menjangkau segmentasi konsumen dari luar desa yang terbiasa bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai.

3.2. Pendampingan Teknis Pendaftaran Akun QRIS dan Evaluasi Kemampuan

Sebagai bentuk implementasi nyata dari sesi pencerahan sosialisasi, tim KKN memfasilitasi pendampingan teknis pendaftaran akun *merchant* QRIS secara langsung di tempat (*on the spot*). Dari total 25 pelaku UMKM yang menghadiri sesi sosialisasi, sebanyak 12 pelaku UMKM menyatakan ketertarikan serta komitmennya untuk langsung mentransformasi sistem pembayaran usaha mereka, sehingga berhasil didampingi hingga tahap pendaftaran akun.

Gambar 2 menunjukkan proses pendampingan pendaftaran QRIS yang dilakukan oleh mahasiswa anggota tim KKN kepada beberapa pelaku UMKM. Dalam gambar tersebut, mahasiswa memandu pelaku usaha langkah demi langkah dalam mengoperasikan ponsel, mulai dari pengisian identitas pemilik usaha, verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengunggahan foto KTP, hingga pemisahan rekening pribadi dengan rekening usaha.

Sebelumnya, sebagian besar pelaku usaha di Desa Karangjati mengalami kebingungan teknis akibat minimnya pemahaman mengenai mekanisme aplikasi, prosedur pemindaian (*scan*) kode QR, hingga alur verifikasi berkas pada perangkat seluler mereka. Oleh karena itu, tim menerapkan metode pendampingan secara personal (*one-on-one mentoring*) untuk memandu setiap pelaku usaha langkah demi langkah, mulai dari pengisian data diri, pengunggahan dokumen identitas, hingga pengunduhan aplikasi *merchant*.



Gambar 2. Pendampingan Pendaftaran Akun QRIS kepada Pelaku UMKM

Dalam proses pelaksanaan pendampingan teknis ini, tim mengidentifikasi beberapa kendala di lapangan, antara lain:

1. **Keterbatasan Sinyal Internet**

Lokasi kegiatan kerap mengalami fluktuasi jaringan, yang diatasi dengan penyediaan *hotspot* pendukung dari tim pelaksana.

2. **Kelengkapan Berkas Administrasi**

Beberapa pelaku usaha tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik atau hasil foto dokumen identitas kurang jelas untuk verifikasi sistem, yang diselesaikan melalui pendampingan pemotretan ulang dokumen.

3. **Kapasitas Penyimpanan Ponsel**

Memori internal ponsel (*storage*) beberapa warga dalam kondisi penuh, sehingga tim membantu melakukan pembersihan berkas sementara (*cache*) agar aplikasi *merchant* dapat terpasang dengan sempurna.

Meskipun menghadapi kendala teknis tersebut, pendekatan intensif secara personal mampu mengatasi seluruh hambatan. Berdasarkan hasil evaluasi langsung pada hari pelaksanaan, sebanyak 8 peserta dari 12 UMKM yang mendaftar telah mampu mengoperasikan aplikasi *merchant* secara mandiri, melakukan pemindaian barcode percobaan (*scan test*), serta mengecek riwayat transaksi dan saldo secara akurat tanpa bantuan tim.

3.3. Distribusi Standee QRIS, Impact SDGs Desa, dan Keberlanjutan Program

Tahap akhir dari rangkaian program pengabdian ini difokuskan pada pemastian bahwa infrastruktur pembayaran digital yang telah dibentuk dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan dalam operasional harian warga. Seluruh data 12 unit UMKM yang telah berhasil memiliki akun aktif diinventarisasi oleh tim untuk dicetak kode QRIS fisik berstandar resmi dalam bentuk *standee* berbahan akrilik.

Gambar 3 memperlihatkan kegiatan tindak lanjut berupa penyerahan *standee* QRIS berbahan akrilik secara *door-to-door* langsung ke tempat usaha milik warga seperti toko/warung. Tim tidak hanya menyerahkan *standee* QRIS secara fisik, tetapi juga memandu pelaku usaha dalam menempatkan *standee* tersebut di area kasir atau etalase toko yang strategis dan mudah terlihat oleh pembeli. Selain itu dilakukan pula simulasi transaksi langsung (*scan test*) untuk memastikan bahwa notifikasi pembayaran masuk secara *real-time* ke ponsel pelaku usaha dan transaksi berjalan tanpa kendala teknis. Para pelaku UMKM memberikan respons yang positif atas bantuan *standee* fisik ini, karena keberadaan QRIS dapat menyelesaikan masalah praktis di lapangan, seperti kesulitan menyediakan uang kembalian pecahan kecil saat bertransaksi.



Gambar 3. Penyerahan Stand Qris pada Pelaku UMKM Warga Desa Karangjati

Dampak dari rangkaian kegiatan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan sejalan dengan upaya pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Implementasi QRIS memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional dan perbaikan tata kelola keuangan UMKM di tingkat desa. Fasilitas pencatatan transaksi otomatis pada aplikasi mempermudah pelaku usaha dalam memantau arus kas (*cash flow*) secara riil dan akurat, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau kehilangan uang tunai. Melalui peningkatan aksesibilitas dan literasi transaksi digital ini, daya saing pelaku UMKM lokal semakin kuat, yang pada gilirannya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif.

Untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dampak program pasca-kegiatan KKN berakhir, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bersama perangkat Desa Karangjati mengambil peran sebagai pendamping lokal (*local champions*). Pengurus KDMP akan meneruskan fungsi pemantauan, memberikan bantuan teknis jika terjadi kendala operasional pada aplikasi warga di kemudian hari, serta mengintegrasikan penggunaan QRIS dalam ekosistem usaha koperasi (Putri dkk., 2025). Dengan demikian, program ini tidak hanya berhenti pada penyerahan fasilitas fisik, melainkan mampu membangun kemandirian dan memperluas inklusi keuangan digital masyarakat Desa Karangjati secara permanen.

3.4. Evaluasi Keberhasilan Kegiatan

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, tim melakukan evaluasi berdasarkan hasil observasi awal dan capaian akhir program kegiatan. Perbandingan kondisi UMKM Desa Karangjati sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan adanya perubahan nyata pada kondisi UMKM di Desa Karangjati. Sebelum kegiatan dilaksanakan, seluruh transaksi jual-beli warga bergantung pada uang tunai dan belum ada tempat usaha yang memiliki QRIS. Setelah pendampingan dilakukan, sebanyak 12 UMKM berhasil memahami sistem pembayaran non-tunai, dengan 8 di antaranya langsung mahir melakukan pemindaian transaksi dan pengecekan saldo secara mandiri di tempat. Perubahan indikator fisik dan teknis pada Tabel 1 membuktikan bahwa kombinasi metode sosialisasi interaktif dan pendampingan efektif mentransformasi sistem transaksi UMKM pedesaan.

Tabel 1. Perubahan Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan

No.	Indikator Evaluasi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Capaian dan Perubahan
1.	Sistem Pembayaran Usaha	Seluruh UMKM masih menggunakan transaksi tunai	12 unit UMKM telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital QRIS	Modernisasi sistem transaksi pada 12 unit UMKM
2.	Pemahaman Transaksi Digital & KDMP	Terbatas pada transaksi tunai dan belum memahami peran koperasi KDMP	Warga memahami fungsi KDMP dan keunggulan transaksi non-tunai	Peningkatan literasi keuangan digital dan kesadaran kelembagaan
3.	Kepemilikan Akun <i>Merchant</i> QRIS	Belum ada pelaku UMKM yang memiliki akun <i>merchant</i> QRIS	12 unit UMKM berhasil mendaftar dan memiliki akun QRIS aktif	Bertambah 12 akun <i>merchant</i> QRIS siap pakai
4.	Kemampuan Operasional Mandiri	Pelaku usaha belum pernah mengoperasikan aplikasi <i>merchant</i>	8 dari 12 pelaku UMKM terdaftar mahir melakukan <i>scan test</i> dan cek saldo mandiri	Terbentuk kemandirian teknis operasional transaksi digital
5.	Fasilitas <i>Display</i> Pembayaran Non-Tunai	Belum ada media petunjuk pembayaran digital di tempat usaha	12 unit <i>standee</i> QRIS akrilik terpasang di area kasir/etalase tempat usaha	12 unit <i>standee</i> fisik terdistribusi 100% secara <i>door-to-door</i>

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pendampingan implementasi QRIS di Desa Karangjati telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang direncanakan. Program ini menjawab tantangan terkait keterbatasan pemahaman kelembagaan ekonomi serta rendahnya literasi digital para pelaku UMKM setempat. Berdasarkan capaian program, sebanyak 25 pelaku UMKM telah mendapatkan edukasi kelembagaan dan transaksi digital, dengan 12 UMKM di antaranya berhasil didampingi hingga tahap aktivasi akun QRIS secara mandiri serta menerima fasilitas *standee* akrilik fisik untuk operasional usahanya.

Melalui pendekatan sosialisasi interaktif dan pendampingan teknis secara langsung (*one-on-one*), para pelaku usaha kini tidak hanya memahami pentingnya peran kolektif KDMP dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga telah memiliki keterampilan praktis dalam mengoperasikan sistem pembayaran non-tunai. Pemanfaatan QRIS mempermudah pencatatan transaksi secara lebih terstruktur, meningkatkan transparansi keuangan, serta meminimalkan risiko operasional transaksi tunai. Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dampak program, pengurus KDMP bersama perangkat Desa Karangjati menjalankan fungsi pemantauan (*monitoring*) dan pendampingan lokal pasca-kegiatan KKN. Selain itu, program ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pihak desa melalui pelatihan manajemen bisnis lanjutan dan strategi pemasaran digital (*digital marketing*), sehingga UMKM beserta koperasi desa dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Seksi Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN), Sub. Direktorat KKN dan Ormawa, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN periode Juli–Agustus 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Desa Karangjati beserta seluruh perangkat desa atas izin, dukungan, serta kerja sama yang sangat baik sebagai mitra selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

Penghargaan turut diberikan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta seluruh masyarakat Desa Karangjati yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi peran koperasi dan pelatihan pembuatan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa KKN UNS Kelompok 28 yang telah bekerja sama secara kompak dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian. Semoga program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi perluasan pasar UMKM serta mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di Desa Karangjati.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Erlangga.
- Indaryan, M. (2024). *UMKM, Koperasi dan Dinamikanya*. Cendekia Press.
- Ismail, Widiarti, A., Muhadiansyah, D., & Koesumah, E. (2025). Bagaimana Kinerja QRIS Dibandingkan dengan Metode Pembayaran Digital Lainnya. Tempo Publishing.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kwartono, M. (2009). Kiat Sukses Berburu Modal UMKM: Usaha Mikro Kecil & Menengah. Raih Asa Sukses.
- Putri, R. D., Aris, M., Sidiq, M., & Juainah, N. (2025). Peningkatan Pemahaman Akses Keuangan Digital melalui QRIS di Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Baru. *Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 33–41. <https://rumah-jurnal.com/index.php/kjpm/article/view/408>
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan: Teori Konsep dan Aplikasi* (Edisi 1). Ekonisia.

Halaman ini dikosongkan